

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis hukum terhadap penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 03/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Mtr, dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku tidak sesuai dengan keadilan yang substantif. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memahami faktor dan pertimbangan hukum yang mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara korupsi. Dalam putusan hakim terdakwa Ramang A.Md dijatuhi Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji karena karena kekuasaan atau kewenangannya, namun seharusnya terdakwa Ramang A.md patut dijatuhi dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Pasal 2 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 65 KUHP dengan unsur seseorang pegawai negeri yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan menyalahgunakan kekuasaannya dan dalam keadaan tertentu.

Kata kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Yuridis Normatif, kewenangan*

ABSTRACT

The aim of this research is to carry out a legal analysis of the application of punishment for perpetrators of criminal acts of corruption in Decision Number 03/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Mtr, by analyzing the basis of the judge's consideration in handing down the Decision on Article 11 of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code and responsibility for criminal acts of corruption committed by perpetrators that are not in accordance with substantive justice. Therefore, the author in this research uses a normative juridical method with the aim of understanding the factors and legal considerations that influence judges' decisions in corruption cases. In the judge's decision, the defendant Ramang A.Md was sentenced to Article 11 of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the eradication of Corruption CRImes with elements of civil servants who received gifts or promises because of their power or authoRIty, However, the defendant Ramang A.md should have been sentenced by consideRIng Article 1 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 regarding amendments to Article 2 paragraphs (1), (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 and Article 12 letter e Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 in conjunction with article 65 of the Criminal Code with the element of a civil servant forcing someone to give something, or receive payment by abusing their power and under certain circumstances.

Keywords: *Corruption Crimes, Judges' Considerations, Normative Jurisdiction, authority.*